BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Kabupaten Bone;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
c. Bupati adalah Bupati Bone;

d. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
e. Kinerja perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan; dan
f. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone :
a. Indeks Reformasi Birokrasi;
b. Nilai SAKIP;
c. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Tingkat Maturitas SPIP;
e. Indeks Pelayanan Publik;
f. Persentase Penduduk Miskin;
g. Tingkat Pengangguran Terbuka;
h. Indeks Pembangunan Manusia;
i. Indeks Desa Membangun;
j. Pertumbuhan Ekonomi;
k. Tingkat Inflasi Daerah;
l. Indeks Gini;
m. Indeks Infrastruktur;
n. Ketaatan terhadap RTRW; dan
o. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pemerintah Kabupaten Bone tahun 2024 – 2026.

BAB IV
PEMBINAAN, REVIEW, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
(2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, berkoordinasi dengan instansi teknis terkait untuk disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemeritahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 87), dan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI MUHAMMAD GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN BONE

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Baik dan Berorientasi Pelayanan | | Indeks Reformasi Birokrasi | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Koordinator:<br>Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) |
| | | 1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP | Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Koordinator:<br>Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)<br><br>Pendukung:<br>Semua Perangkat Daerah |
| | | 1.2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Niai Indeks diperoleh dari hasil Penilaian Pemerintah Provinsi yang mengikuti 6 Dimensi yang dipakai dalam mengukur IPKD :<br>1. Kesesuaian Dokumen perencanaan dan penganggaran<br>2. Kualitas anggaran belanja dalam APBD<br>3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah<br>4. Penyerapan Anggaran<br>5. Kondisi Keuangan Daerah<br>6. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Laporan Hasil Penilaian IPKD Kabupaten Kota oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | Koordinator:<br>Badan Keuangan dan Aset Daerah<br><br>Pendukung:<br>Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah |

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | 1.3. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan | Tingkat Maturitas SPIP | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian BPKP | Laporan hasil penilaian BPKP | Koordinator:<br>Inspektorat Daerah |
| | | 1.4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inklusif | Indeks Pelayanan Publik | Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat ditentukan dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Bagian Organisasi), LHE Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah (KEMENPANRB) | Koordinator:<br>Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)<br><br>Pendukung:<br>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, RSUD, dan 27 Kecamatan |
| 2. | Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif | | Persentase Penduduk Miskin | $p_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^\alpha$<br>Dimana:<br>α = 0<br>Z = Garis Kemiskinan<br>$Y_i$ = Rata-Rata Pengeluaran per kapita Sebulan Penduduk yang Berada di bawah Garis Kemiskinan (i=1,2,3,.....q), $y_i$<Z<br>Q = Banyaknya Penduduk yang berada di Bawah Garis Kemiskinan<br>n = Jumlah Penduduk | Kabupaten Bone Dalam Angka (BPS) | Koordinator:<br>BAPPEDA (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam) |
| | | 2.1. Menurunnya Angka Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | Jumlah Penganggur Terbuka<br>Usia Angkatan Kerja<br>---------- x 100%<br>Jumlah Penduduk Angkatan Kerja | Kabupaten Bone Dalam Angka (BPS) | Koordinator:<br>Dinas Ketenagakerjaan<br><br>Pendukung:<br>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga |

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | 2.2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Indeks Pembangunan Manusia | IPM = 1/3 [$X_{(1)}$ + $X_{(2)}$ + $X_{(3)}$]<br>Dimana:<br>$X_{(1)}$ : Indeks Harapan Hidup<br>$X_{(2)}$ : Indeks Pendidikan = 2/3(Indeks Melek Huruf) + 1/3(Indeks Rata-Rata Lama Sekolah)<br>$X_{(3)}$ : Indeks Standar Hidup Layak<br><br>Indeks $X_{(i)}$ = $X_{(i)}$ - $X_{(i)min}$ / [$X_{(i)maks}$ - $X_{(i)min}$]<br>Dimana:<br>$X_{(1)}$ : Indikator ke-I (I = 1, 2, 3)<br>$X_{(2)}$ : Nilai Maksimum Sekolah $X_{(i)}$<br>$X_{(3)}$ : Nilai Minimum Sekolah $X_{(i)}$ | Kabupaten Bone Dalam Angka (BPS) | Koordinator:<br>Bappeda (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)<br><br>Pendukung:<br>Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan UPT RSUD Tenriawaru |
| | | 2.3. Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Indeks Desa Membangun | IDM = 1/3(IKS + IKE + IKL)<br>Keterangan:<br>IKS : Indeks Ketahanan Sosial<br>IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi<br>IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi | SK Kemendes | Koordinator:<br>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br><br>Pendukung:<br>Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 2.4. Meningkatnya Perekonomian Daerah | Pertumbuhan Ekonomi | $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$<br><br>Dimana:<br>t+1 = Tahun Pengamatan PDRB<br>t = Tahun Pengamatan PDRB Sebelumnya | Kabupaten Bone Dalam Angka (BPS) | Koordinator:<br>BAPPEDA (Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam)<br><br>Pendukung:<br>Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian |

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | 2.5. Meningkatnya Perekonomian Daerah | Tingkat Inflasi Daerah | {(1 + ΔInf1) (1 +ΔInf2)(1 + ΔInft )} 1/t ] −1<br>Dimana :<br>ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya<br>t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.<br>Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :<br>$\Delta Inf = \frac{Inf(n+1) - inf(n)}{Inf(n)} \times 100\%$<br>Dimana :<br>Infn = nilai inflasi pada tahun n<br>Inf(n+1) = nilai pada 1 tahun berikutnya<br>n = tahun ... | Kabupaten Bone Dalam Angka (BPS) | Koordinator:<br>BAPPEDA (Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam)<br><br>Pendukung:<br>Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian |
| | | 2.6. Terwujudnya Pemerataan Pendapatan | Indeks Gini | $G = 1 - \sum_{i=1}^{k} P_i(Q_i + Q_{i-1})$<br><br>$P_i$ = Persentase Rumah Tangga atau Penduduk pada Kelas ke-i<br>$Q_i$ = Persentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas ke-i<br>Nilai *gini ratio* Berkisar antara 0 dan 1, jika:<br>G < 0,3 = Ketimpangan Rendah<br>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang<br>G > 0,5 = Ketimpangan Tinggi | Kabupaten Bone Dalam Angka (BPS) | Koordinator:<br>BAPPEDA (Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam)<br><br>Pendukung:<br>Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Ketenagakerjaan |
| 3. | Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Ramah Lingkungan | | Indeks Infrastruktur | (Kemantapan Jalan x Koefisien Mantap Jalan) + (Capaian SPAM x Koefisien Capaian SPAM) + (Capaian Layanan Sanitasi x Koefisien Capaian Layanan Sanitasi) + (Capaian Layanan Listrik x Koefisien Capaian Layanan Listrik) + (Capaian Layanan Telekomunikasi x Koefisien Capaian Layanan Telekomunikasi) | Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan, PLN, dan Telkom | Koordinator:<br>BAPPEDA (Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) |

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | 3.1. Terciptanya Ketaatan Terhadap RTRW | Ketaatan terhadap RTRW | Realisasi RTRW<br>---------- x 100%<br>Rencana Peruntukan | Bidang Penataan Ruang | Koordinator:<br>Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang<br><br>Pendukung:<br>Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 3.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)<br><br>IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>IKA = Indeks Kualitas Air<br>IKU = Indeks Kualitas Udara<br>IKL = Indeks Kualitas Lahan | Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah | Koordinator:<br>Kepala Dinas Lingkungan Hidup<br><br>Pendukung:<br>Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekretariat Daerah | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional | Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten | Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri | Dok. Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri | Sekretaris Daerah |
| 2. | Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah | Tingkat Inflasi Daerah | Hasil Survey BPS Kab. Bone | Dok. Hasil Survey BPS Kab. Bone | Sekretaris Daerah |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah | Nilai Predikat SAKIP oleh APIP | Hasil Evaluasi/Penilaian SAKIP oleh APIP | Dok. Hasil Evaluasi/Penilaian SAKIP oleh APIP | Sekretaris Daerah |
| | | Survey Kepuasan Masyarakat/IKM | Nilai Rata-Rata Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik | Laporan Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik | Sekretaris Daerah |
| Sekretariat DPRD | | | | | |
| 1. | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Indeks Kepuasan Masyarakat (Unsur Pendukung Pemerintahan) | Nilai Rata-rata Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Oleh Bagian Organisasi | Sekretaris DPRD |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP (PREDIKAT) | Predikat SAKIP oleh APIP | Dok. Hasil Evaluasi/ Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bone | Sekretaris DPRD |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Meningkatnya Kualitas Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Ketuntasan Tugas dan Fungsi DPRD | (Persentase Ranperda Yang ditetapkan + Persentase Non Ranperda Yang Ditetapkan + Persentase Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu + Persentase Rekomendasi yang Dikirim Kepada Bupati) / 4 | | |
| | | | Persentase Ranperda Yang Ditetapkan =<br>Jumlah Ranperda yang ditetapkan<br>---------- x 100%<br>Jumlah Keseluruhan Ranperda | Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD | Sekretaris DPRD |
| | | | Persentase Non Ranperda Yang Ditetapkan =<br>Jumlah Non Ranperda yang Ditetapkan (Keputusan DPRD)<br>---------- x 100%<br>Jumlah Non Ranperda yang Direncanakan | Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD | Sekretaris DPRD |
| | | | Persentase Kebijakan Perancanaan dan Penganggaran yang disepakati Tepat Waktu =<br>Jumlah Kebijakan Perencanaan dan Anggaran yang Disepakati Tepat Waktu<br>---------- x 100%<br>Jumlah Kebijakan Perencanaan dan Anggaran yang Harus Disepakati | Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD | Sekretaris DPRD |
| | | | Persentase Rekomendasi DPRD yang Dikirim Kepada Bupati =<br>Jumlah Rekomendasi yang Dikirim Kepada Bupati<br>---------- x 100%<br>Jumlah Rekomendasi yang Direncanakan | Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD | Sekretaris DPRD |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspektorat Daerah | | | | | |
| 1. | *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah* | Nilai Maturitas SPIP | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian BPKP | Laporan hasil penilaian BPKP | Inspektur Daerah |
| | | Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Opini BPK-RI sesuai dengan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023 | Inspektur Daerah |
| | | Tingkat Kapabilitas APIP | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian (*Assessment*) atas Tingkat Kapabilitas APIP lnspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP | Laporan Hasil Penilaian (*Assessment*) atas Tingkat Kapabilitas APIP lnspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP, pada Tahun 2024-2026 | Inspektur Daerah |
| | | Nilai SAKIP Kabupaten | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN-RB | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Kementerian PAN-RB, pada Tahun 2024-2026 | Inspektur Daerah |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Efektif, Efisien, Ekonomis dan Berkelanjutan | Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada level 3 (Terdefinisi) Berdasarkan Hasil Penilaian APIP | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi SPIP oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh APIP pada Tahun 2024-2026 | Inspektur Daerah |
| | | Persentase OPD dengan Predikat Evaluasi SAKIP minimal A oleh APIP | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh APIP pada Tahun 2024-2026 | |
| | | Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik yang mendapatkan status WBK/WBBM | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi oleh KemenPAN-RB | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh KemenPAN-RB, pada Tahun 2024-2026 | Inspektur Daerah |
| | | Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Temuan Hasil pemeriksaan BPK-RI | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan rekomendasi BPK-RI sesuai dengan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023 | Inspektur Daerah |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan APIP | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Jumlah Laporan Pengaduan di bagi dengan pengaduan yang telah ditindak lanjuti | Data pengaduan yang masuk di Inspektorat | Inspektur Daerah |
| 3. | Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah Selaku APIP Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Hasil *Self Assesment* Kapabilitas APIP Inspektorat daerah | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian (*Assessment*) atas Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bone oleh BPKP | Laporan Hasil Penilaian (*Assessment*) atas Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP | Inspektur Daerah |
| 4. | Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh APIP | Inspektur Daerah |
| Dinas Pendidikan | | | | | |
| | *Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif* | | | | |
| 1. | Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | Lama Sekolah Penduduk i yang Berusia 15 – 24 Tahun<br>----------<br>Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun | Dinas Pendidikan | Kepala Dinas Pendidikan |
| | | Harapan Lama Sekolah | Jumlah Penduduk Usia i yang Bersekolah pada tahun t<br>----------<br>Jumlah Penduduk Usia i pada tahun t | Dinas Pendidikan | Kepala Dinas Pendidikan |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pendidikan | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Nilai Capaian Target Kinerja Ditentukan Berdasarkan Hasil Evaluasi Inplementasi SAKIP | Laporan Hasil Evaluasi Inplementasi SAKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat Kab. Bone | Kepala Dinas Pendidikan |
| Dinas Kesehatan | | | | | |
| | *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif* | | | | |
| 1. | Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat | Persentase Balita Stunting | Jumlah Balita Pendek<br>+<br>Balita Sangat Pendek<br>---------- x 100%<br>Jumlah Balita yang di Ukur Panjang/Tinggi Badan | Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Angka Kematian Bayi | Jumlah Kematian Bayi (Berumur <1 Tahun) pada Satu Tahun Tertentu ---------- x 100% Jumlah Kelahiran Hidup pada Satu Tahun Tertentu | Format Laporan Kematian Bayi dan Balita pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan |
| | | Angka Kematian Ibu | Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal karena Hamil, Bersalin dan Nifas di suatu Wilayah Tertentu selama 1 Tahun ---------- x 100% Jumlah Kelahiran Hidup di Wilayah tersebut dan pada Kurun Waktu yang Sama | Format Laporan Kematian Ibu pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan |
| | | Persentase Balita Gizi Buruk | Jumlah Balita Gizi Buruk ---------- x 100% Jumlah Balita yang di Ukur Berat Badan | Hasil Pemantauan Satus Gizi (PSG) pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan |
| | | Indeks Keluarga Sehat | Jumlah Indikator Keluarga Sehat yang Bernilai 1 ---------- x 100% 12 – Jumlah Indikator yang tidak ada di Keluarga | Aplikasi Keluarga Sehat pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan |
| | | Prevalensi HIV/AIDS | Jumlah Pasien HIV dan AIDS di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu tertentu ---------- x 100% Jumlah Penduduk di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu yang Sama | Sistem Informasi HIV-AIDS (SIHA) pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Kepala Dinas Kesehatan |
| | | Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi | Jumlah Fasilitas yang Terakreditasi (Paripurna) ---------- x 100% Jumlah Fasilitas Kesehatan | Hasil Akreditasi pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | | | | | |
| 1. | Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DINAS BMCKTR | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Nilai Capaian Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten yang Mantap<br>---------- x 100%<br>Panjang Jalan Keseluruhan di Wilayah Kabupaten | Laporan Hasil Survey Kondisi Jalan Kabupaten | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Pengelolaan Air Minum, Sanitasi, Drainase Perkotaan, dan Persampahan Bagi Masyarakat | Jumlah Komulatif Masyarakat yang Rumah Tangga Mendapat Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi di Dalam Sebuah Kabupaten/Kota<br>---------- x 100%<br>Jumlah Total Proyeksi Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota Tersebut | Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Persampahan | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | | Jumlah Rumah yang memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk<br>+<br>Jumlah Rumah yang Lumpur Tinjanya Telah Diolah di PLT<br>+<br>Jumlah Rumah Yang Memiliki Sambungan Rumah dan Air Limbahnya Diolah di IPLD<br>---------- x 100%<br>Jumlah Rumah di Kabupaten | Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Persampahan | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | | Jumlah Panjang Drainase Kondisi Baik di Perkotaan<br>---------- x 100%<br>Panjang Total Drainase di Perkotaan | Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Persampahan | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah Unit Sapras Sampah yang Terbangun<br>---------- x 100%<br>Jumlah Unit Kebutuhan Sapras Persampahan | Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Persampahan | |
| 3. | Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Dan Permukiman Serta Kawasan Bangunan Lainnya Sesuai RTRW | Rasio Kepatuhan IMB/PBG Wilayah Kabupaten | Jumlah Pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai Peruntukannya<br>---------- x 100%<br>Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang Berlaku | Laporan Persetujuan Bangunan Gedung | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air | Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)<br>---------- x 100%<br>Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) | Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air | Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| | | Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota (m)<br>---------- x 100%<br>Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi di WS Kewenangan Kab/Kota (m) | Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air | Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| | | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi | Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi yang Dibangun (ha), Ditingkatkan (ha), Direhabilitasi (ha), Dioperasi dan Dipelihara (ha) di Tahun Eksisting<br>---------- x 100%<br>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air dan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air | Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Tersedianya Tenaga Jasa Konstruksi | Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis Terampil Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Operator Yang Teknis/Analisis<br>---------- x 100%<br>Jumlah Kebutuhan Tenaga Operator Yang Teknis/Analisis di Wilayah di Wilayah Kabupaten/Kota | Bidang Bina Jasa Konstruksi | Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | | | | | |
| | *Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Ramah Lingkungan* | | | | |
| 1. | Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n<br>---------- x 100%<br>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n | Bidang Perumahan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2. | Meningkatnya Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota | Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni<br>---------- x 100%<br>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan | Bidang Perumahan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 3. | Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani | Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)<br>---------- x 100%<br>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha | Bidang Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Meningkatnya Penataan Kualitas Kawasan Permukiman | Persentase Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni<br>---------- x 100%<br>Jumlah Total Unit Rumah Kabupaten/Kota | Bidang Perumahan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 5. | Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU<br>---------- x 100%<br>Jumlah unit Perumahan Kabupaten/Kota | Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 6. | Meningkatnya Lahan Pemerintah yang Bersertifikat | Persentase Bidang Lahan Pemerintah Yang Mendapatkan Sertifikat | Jumlah Bidang Lahan yang Bersertifikat pada tahun n<br>---------- x 100%<br>Jumlah Total Bidang Lahan Kabupaten | Bidang Pertanahan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 7. | Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Disperkimtan | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Predikat Hasil Evaluasi SAKIP | Sekretariat | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik dalam Penanganan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Nilai Capaian Target Kinerja Ditentukan Berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Capaian Target Kinerja Ditentukan Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone | Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 2. | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | (Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Terdampak Kebakaran di Kab/Kota dalam tingkat Waktu Tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Kejadian Kebakaran | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | + Jumlah Layanan Pemadaman di Kab/Kota dalam tingkat Waktu Tanggap oleh Relawan Kebakaran yang Dibentuk dan atau di bawah Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) ---------- x 100% Jumlah Kejadian Kebakaran di Kab/Kota | | |
| Satuan Polisi Pamong Praja | | | | | |
| 1. | Terlaksananya Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum | Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan | Gangguan Trantibum Diselesaikan ---------- x 100% Gangguan Trantibum yang Ditangani | Bidang Ketentraman & Ketertiban Umum dan Bidang Bimbingan Masyarakat | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2. | Terlaksananya Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada | Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang Ditangani dan Diselesaikan | Jumlah Kasus Pelanggaran yang Ditangani dan Diselesaikan ---------- x 100% Jumlah Kasus Pelanggaran Perda | Bidang Penegakan Peraturan Daerah | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| 3. | Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat di Seluruh Wilayah Kecamatan | Bidang Perlindungan Masyarakat | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| Dinas Sosial | | | | | |
| 1. | Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola dan Kinerja Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Dinas Sosial | Kepala Dinas Sosial |
| | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi Mandiri | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri ---------- x 100% Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditangani | Dinas Sosial | Kepala Dinas Sosial |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase Penurunan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mandiri<br>---------- x 100%<br>Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ada | Dinas Sosial | Kepala Dinas Sosial |
| Dinas Ketenagakerjaan | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Daya Saing dan Serapan Tenaga Kerja | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja | Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke RTKD<br>---------- x 100%<br>Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang Dilaksanakan | Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan | Kepala Dinas Ketenagakerjaan |
| | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi<br>---------- x 100%<br>Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan | UPTD BLK, dan Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja | Kepala Dinas Ketenagakerjaan |
| | | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten | Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan<br>---------- x 100%<br>Jumlah Pencari Kerja yang Terdafar | Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dan Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas | Kepala Dinas Ketenagakerjaan |
| | | Presentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola yang layak (PP/PKB/LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak<br>---------- x 100%<br>Jumlah Perusahaan | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | Kepala Dinas Ketenagakerjaan |
| 2. | Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah | Prosentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%) | NILAI SAKIP Oleh APIP | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone | Kepala Dinas Ketenagakerjaan |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | |
| | *Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender Serta Pemberdayaan Perempuan dan Anak* | | | | |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender IPG dan IDG | Persentase Organisasi Perempuan yang Aktif | • Yang dimaksud Organisasi Perempuan dan Anak adalah Organisasi Perempuan dan Anak yang memiliki AD/ART dan/atau berbadan hukum, terdaftar di kesbangpol atau dikementerian Hukum dan HAM.<br>• Lembaga Organisasi Perempuan Pemerintah yang Aktif :<br>Lembaga Organisasi Perempuan Pemerintah yang tetap eksis atau masih aktif stahun dibagi jumlah lembaga/organisasi Kab/Kota.<br><br>Jumlah Organisasi Perempuan yang Aktif<br>---------- x 100%<br>Total Organisasi Perempuan | BPS, OPD terkait, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah | Kepala DPPPA |
| | | Persentase SKPD yang Menerapkan Anggaran Berbasis Gender (ARG) | • Anggaran Resfonsif Gender (ARG) adalah Anggaran yang Mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki memperoleh akses, manfaat, berpartisifasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan penerapan anggaran berbasis gender adalah pernyataan anggaran gender bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan anggaran telah menggunakan Gender Budget Stament (GBS) Analisa Gender<br>• Untuk menemukan Isu/Kesenjangan Gender, bisa menggunakan alat analisis Gender yang ada. Salah satunya Gender Analysis Pathway (GAP).<br>• Isu/Kesenjangan Gender dapat dilihat Output yang ada menyusun GBS. informasi yang didapat analisis dimasukkan ke dalam Dokumen (GBS)<br><br>Rumusnya:<br>Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan GBS dalam penyusunan anggaran dibagi total Perangkat Daerah Kab. Kota | PD terkait, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah | Kepala DPPPA |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah PD Menerapkan GBS Kab. Kota<br>---------- x 100%<br>Total PD Kab. Kota | | |
| | | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Gender dan Anak yang sudah terpilah | • Data adalah kumpulan nilai variable yang dinyatakan dalam bentuk Kuantitatif dan Kualitatif. Ringkasan data kuantitatif dinamakan statistik<br>• Data terpilah adalah nilai variable-variabel yang terpilih menurut berbagai jenis ciri atau karakteristik pada umumya pemilihan ini dilakukan apabila kita akan melokasisasikan atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan di suatu bidang tertentu<br>• Data dapat dipilah menurut berbagai ciri atau karakteristik tergantung pada jenis analisis yang akan dilakukan. Bila melakukan analisa gender, data perlu dipilah menurut jenis kelamin. Untuk melakukan analisis kesenjangan alokasi pembangunan atau analisis special, data perlu dipilih menurut wilayah. Begitu analisa dapat dilakukan berdasarkan umur, waktu kejadian seperti analisis kohor dan analisis deret waktu atau anlisis time series.<br>• Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, kondisi antara laki-laki dan perempuan.<br><br>Jumlah PD Mempunyai Data Terpilah<br>---------- x 100%<br>Total PD Kab. Kota | PD terkait, Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah | |
| 2. | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindakan Kekerasan dan Pemenuhan Layanan Hak Keluarga | Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk (Usia 18 Tahun Ke atas) | • Kekerasan adalah setiap perbuatan seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara Fisik, seksual, Fisikologis, dan/atau penelantaraan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (sesuai pasal 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak) | BPS, PD terkait, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Laporan Data UPT-P2TP2A Kab. Bone | Kepala DPPPA |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | • Perempuan Korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami kekerasan Fisik, Sikis, Ekonomi, Seksual yang melapor pada Lembaga Layanan di daerah Kab/Kota<br><br>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota<br>---------- x 100.000<br>Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun ke atas Kab/Kota<br><br>Keterangan:<br>Jumlah Korban Perempuan Korban Kekerasan Tahun Ke 19 (Orang)<br>Jumlah Perempuan Usia 18 Tahun ke atas Kabupaten Kota Tahun ke 19 (Orang) 2022 | | |
| | | Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus per 100.000. (Usia Kandungan -18 Tahun) | • Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (sesuai dengan pasal 1 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)<br><br>Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus hanya dibatasi pada data<br>1. Anak yang berhadapan hukum<br>2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika<br>3. Anak dengan HIV/AIDS<br>4. Anak Korban kekerasan fisik, dan sikis/emosional, kekerasan seksual, Penelantaran<br>5. Anak Penyandang disabilitas<br><br>Jumlah Korban Anak yang memerlukan perlindungan khusus<br>---------- x 100.000<br>Jumlah Penduduk Anak Usia 0 -18 Tahun Kab. Kota | BPS, PD terkait, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Laporan Data UPT P2TP2A Kab. Bone | Kepala DPPPA |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Keluarga | • Penyediaan Layanan bagi keluarga mewujudkan kesetaraan Gender adalah suatu kesatuan Gender untuk kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan terpenuhinya hak anak<br>Jumlah penyedia layanan yang aktif<br>---------- x 100.000<br>Jumlah Kesetaraan Gender | BPS,OPD terkait, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Laporan Data UPT P2TP2A Kab. Bone | Kepala DPPPA |
| | | Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) | • Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) adalah : sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah dan masyarkat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dan kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.<br>• Tujuan Kota Layak Anak (KLA) adalah : Untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformsi konvensi hak-hak anak (*Convension on the rights of Chaild*) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/Kota.<br>• Sebuah Kabupaten/Kota layak Anak (KLA). idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut dilaksanakan pengelompokan indikator ke dalam 6 (Enam) bagian, yang meliputi, kelembagaan, Hak Sipil Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya, perlindungan Khusus.<br>*Jumlah Nilai Perolehan (Skoring)* | DPPPA, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, dan PD yang terkait dengan KLA | Kepala DPPPA |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Ketahanan Pangan | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama yang terjangkau Bagi Masyarakat | Persentase Pemerataan Ketersediaan Pangan Utama Wilayah Kabupaten | Jumlah Cadangan Beras Pemkab Bone<br>---------- x 100%<br>Target Kabupaten Bone | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | Kepala Dinas Ketahanan Pangan |
| 2. | Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Berkualitas (B2SA) | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor PPH =<br>Skor PPH Klp. Padi-Padian + ….. +<br>Skor PPH Klp. Lain | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | Kepala Dinas Ketahanan Pangan |
| 3. | Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Daerah | Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah | Kepala Dinas Ketahanan Pangan |
| Dinas Lingkungan Hidup | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup serta Kualitas Lingkungan Hidup | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Daerah | LHE Inspektorat Daerah | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 2. | Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air<br>Indeks Kualitas Udara | Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup oleh KLHK | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 3. | Meningkatnya Kebersihan dan Pengelolaan Lingkungan | Sertifikat Adipura | Penghargaan oleh KLHK | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Hasil Evaluasi oleh Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Inspektorat Kabupaten Bone | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inklusif | Indeks Pelayanan Publik | Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat ditentukan dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada Bidang Pelayanan | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | |
| | *Menigkatnya Kinerja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Akuntabel* | | | | |
| 1. | Meningkatnya Desa dengan Status Mandiri | Persentase Desa dengan Status Mandiri | Jumlah Desa Mandiri<br>---------- x 100%<br>Jumlah Total Desa | Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone |
| 2. | Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMD | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Nilai Capaian Target Kinerja Ditentukan Berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bone | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | |
| 1. | Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP | Penilaian APIP | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bone | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2. | Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevelence Rate*/MCPR) | Jumlah PUS yang tidak ber-KB (ingin anak tunda + Tidak ingin anak lagi)<br>---------- x 100%<br>Jumlah PUS | Laporan Bulanan F1 Pengendalian Lapangan (Dalap) pada Bidang Pengendalian Penduduk | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan PUS ingin ber-KB tidak terlayani (*Unmet Need*) | Jumlah Peserta KB Aktif<br>---------- x 100%<br>Jumlah PUS | Laporan Bulanan F1 Pengendalian Lapangan (Dalap) pada Bidang Pengendalian Penduduk | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Terwujudnya Keluarga Yang, Tentram dan Bahagia | Angka Kelahiran pada Remaja Umur 15–19 Tahun (*Age Spesific fertility Rate*, ASFR) | ASFR adalah Angka Kelahiran di Kelompok Usia 15-19 Tahun $ASFRi^b = \frac{i}{p_i^i} X K$ | SUSENAS/Dinkes Kabupaten Bone | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*, TFR) | $TFR = 5 \sum_{i-1}^{7} ASFR\ i$ | SUSENAS/Dinkes Kabupaten Bone | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Dinas Perhubungan | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan | Nilai SAKIP oleh APIP | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bone | Kepala Dinas Perhubungan |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perhubungan yang Didukung oleh Sumber Daya Manusia Transportasi yang Handal, Efisien dan Efektif | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Daerah yang Masuk/Keluar Daerah selama 1 (satu) Tahun | • Bidang Lalu Lintas dan Angkutan<br>• UPT Terminal dan Perparkiran | Kepala Dinas Perhubungan |
| | | Persentase Layanan Angkutan Darat | Jumlah Angkutan Darat<br>---------- x 100%<br>Jumlah Penumpang Angkutan Darat | • Bidang Lalu Lintas dan Angkutan<br>• UPT Terminal dan Perparkiran | Kepala Dinas Perhubungan |
| | | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | Jumlah Angkutan Umum yang tidak Memiliki KIR pada Tahun n<br>---------- x 100%<br>Jumlah Angkutan Umum pada Tahun n | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | Kepala Dinas Perhubungan |
| | | Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun | Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/ Bandara/Terminal per Tahun | Dinas Perhubungan | Kepala Dinas Perhubungan |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian oleh Inspektorat Kabupaten Bone | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2. | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Predikat Penilaian Keterbukaan Informasi | Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi | Laporan Penilaian Keterbukaan Informasi Pemerintah Kab. Bone oleh Komisi Informasi | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 3. | Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Self Asessment Indeks SPBE | Hasil Penilaian SPBE oleh Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE | Laporan Hasil Penilaian SPBE oleh Tim Asessor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 4. | Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) | Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh BPS | Laporan Hasil EPSS oleh BPS | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 5. | Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian | Indeks Keamanan Informasi | Hasil Evaluasi Indeks KAMI Mandiri oleh Tim Internal | Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Indeks KAMI oleh Tim Internal Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | |
| | *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perekonomian Daerah Sektor Koperasi dan UKM* | | | | |
| 1. | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset (%) | Jumlah Koperasi RAT<br>---------- x 100%<br>Jumlah Koperasi Aktif | Bidang Kelembagaan dan Pengawasan | Kepala Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha | Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (%) | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha tahun berjalan (n)<br>-<br>Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha tahun lalu (n-1)<br>---------- x 100%<br>Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha tahun lalu (n- 1) | Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro | Kepala Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hasil Evalusi SAKIP oleh APIP | Predikat Hasil Evaluasi SAKIP | Laporan Hasil Evaluasi Inplementasi SAKIP Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Inspektorat Kab. Bone | Kepala Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | |
| 1. | Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3. | Meningkatnya Daya Tarik Investasi/Penanaman Modal di Kabupaten Bone | Nilai Investasi PMDN dan PMA | Nilai PMDN dan PMA | Database OSS-RBA | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Potensi Sumber Daya Kepemudaan dalam Pembangunan Daerah | Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif<br>---------- x 100%<br>Jumlah Seluruh Organisasi Kepemudaan | Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan, dan Bidang Pengembangan Pemuda | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah | Peningkatan Prestasi Olahraga Berdasarkan Jumlah Perolehan Medali (pada Event Olahraga Tk. Provinsi, Nasional/ Internasional) | Jumlah Perolehan Medali (pada Event Olahraga Tk. Provinsi, Nasional/ Internasional) | Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang Pembudayaan Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| Dinas Kebudayaan | | | | | |
| | *Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola dan Kinerja Pelestarian Budaya Daerah* | | | | |
| 1. | Meningkatnya Warisan Budaya Daerah yang Dilestarikan | Persentase Warisan Budaya Daerah yang Dijaga Kelestarian | Jumlah Warisan Budaya Daerah yang Dilestarikan<br>---------- x 100%<br>Jumlah Warisan Budaya Daerah yang di Data | Bidang Adat & Tradisi, dan Bidang Sejarah Purbakala & Cagar Budaya | Kepala Dinas Kebudayaan |
| 2. | Meningkatnya Standar Museum | Hasil Standarisasi Museum | Nilai Capaian Standarisasi Museum ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Museum oleh Dirjen Kebudayaan | UPT Museum | Kepala Dinas Kebudayaan |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Nilai Capaian Target Kinerja Ditentukan Berdasarkan Hasil Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP oleh APIP | Kepala Dinas Kebudayaan |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat yang Diukur Menggunakan Survey/Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat | Data Bidang Pengembangan Perpustakaan | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Persentase Pemustaka Per Tahun | Jumlah Pemustaka<br>---------- x 100%<br>Jumlah Penduduk Usia 10-59 Tahun | Data Bidang Layanan Perpustakaan | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Nilai SKM Pelayanan Perpustakaan | Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Data Bidang Pengembangan Perpustakaan | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk | Koleksi Perpustakaan yang Tersedia di berbagai Perpustakaan<br>---------- x 100%<br>Jumlah Penduduk Usia 10-59 Tahun | Data Bidang Pustaka | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Daerah | Prosentase Pencipta Arsip yang Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan | Jumlah Pencipta Arsip yang Melaksanakan Pengelolaan Arsip Secara Tertib<br>---------- x 100%<br>Jumlah Pencipta Arsip yang Menjadi Sasaran tertib Arsip | Data Bidang Pembinaan Kearsipan | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Dinas Perikanan | | | | | |
| 1. | Meningkatkan Produksi Perikanan | Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap | Nilai Akhir - Nilai Awal<br>---------- x 100%<br>Nilai Awal | Renstra 2018 - 2023 | Kepala Dinas Perikanan |
| | | Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya | Nilai Akhir - Nilai Awal<br>---------- x 100%<br>Nilai Awal | Renstra 2018 - 2023 | Kepala Dinas Perikanan |
| | | Pertumbuhan Produksi Olahan Hasil Perikanan | Nilai Akhir - Nilai Awal<br>---------- x 100%<br>Nilai Awal | Renstra 2018 - 2023 | Kepala Dinas Perikanan |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bone | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pemerintahan Indikator Program Tekhnis Dinas Perikanan | Realisasi<br>---------- x 100%<br>Target | Renstra 2018 - 2023 | Kepala Dinas Perikanan |
| Dinas Pariwisata | | | | | |
| 1. | *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Perekonomian Daerah Sektor Pariwisata* | Predikat SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Hasil Evaluasi Oleh APIP | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | LHE Implementasi SAKIP oleh APIP Kabupaten (Inspektorat Daerah Kabupaten Bone) | Dinas Pariwisata |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Hasil Evaluasi Oleh APIP | Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP | LHE Implementasi SAKIP oleh APIP Kabupaten (Inspektorat Daerah Kabupaten Bone) | Dinas Pariwisata |
| 3. | *Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Inklusif* | Persentase PDRB Harga Berlaku Sektor Pariwisata | Jumlah Kontribusi PDRB Harga Berlaku Sektor Pariwisata<br>---------- x 100%<br>Jumlah Target Kontribusi PDRB Harga Berlaku Sektor Pariwisata | Buku Bone Dalam Angka Tahunan Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Bone (Bidang Pembinaan Hotel, Rumah Makan dan Tempat Wisata) | Dinas Pariwisata |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Meningkatnya Perekonomian Daerah Sektor Pariwisata | Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata | Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata<br>---------- x 100%<br>Jumlah Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata | Data Realisasi PAD Sektor Pariwisata (Bidang Pembinaan Hotel, Rumah Makan dan Tempat Wisata) | Dinas Pariwisata |
| 5. | Meningkatnya Perekonomian Daerah Sektor Pariwisatas | Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) per-kebangsaaan | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Per-kebangsaaan<br>---------- x 100%<br>Jumlah Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Per-kebangsaaan | Data Kunjungan Wisatawan Macanegara (Wisman) (Bidang Promosi dan Pemasaran) | Dinas Pariwisata |
| | | Persentase peningkatan perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) yang datang ke Kabupaten | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) Yang Datang Ke Kabupaten<br>---------- x 100%<br>Jumlah Target Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) Yang Datang Ke Kabupaten | Data Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) (Bidang Promosi Dan Pemasaran) | Dinas Pariwisata |
| | | Persentase Tingkat Hunian Akomodasi | Jumlah Kamar Yang Terjual<br>---------- x 100%<br>Jumlah Kamar Tersedia | Daftar Tamu Hotel, Wisma, Pondok, Penginapan, Home Stay dan Villa (Bidang Pembinaan Hotel, Rumah Makan dan Tempat Wisata) | Dinas Pariwisata |
| Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun :<br>1. Komoditi Padi<br>2. Komodti Jagung<br>3. Komoditi Cabe Besar<br>4. Komoditi Bawang Merah<br>5. Komoditi Kelapa<br>6. Komoditi Cengkeh | Jumlah Produksi Padi (Ton)<br>---------- x 100%<br>Luas Panen (Ha) | Dinas TPHP | Kepala Dinas TPHP |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Unggulan Daerah | Persentase Pertumbuhan Produksi Telur | Jumlah Produksi Telur Tahun Berjalan (n) – Jumlah Produksi Telur Tahun Sebelumnya (n - 1) ---------- x 100% Jumlah Produksi Telur Tahun Sebelumnya (n - 1) | Data Sektoral Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | Persentase Pertumbuhan Produksi Daging Sapi | Jumlah Produksi Daging Tahun Berjalan (n) – Jumlah Produksi Daging Tahun Sebelumnya (n - 1) ---------- x 100% Jumlah Produksi Daging Tahun Sebelumnya (n - 1) | Data Sektoral Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Dinas Perdagangan | | | | | |
| | *Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah* | | | | |
| 1. | Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Perdagangan | Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan ---------- x 100% Jumlah Total PDRB | BPS | Kepala Dinas Perdagangan |
| | | Persentase Pasar dalam Kondisi Baik | Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik ---------- x 100% Jumlah Seluruh Pasar | Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi | |
| | | Persentase Produk Ekspor Unggulan Daerah yang Terpublikasi Melalui Promosi | Jumlah Potensi Komodity Unggulan yang Terpublikasi ---------- x 100% Jumlah Keseluruhan Komodity Unggulan | Bidang Pengembangan Perdagangan | Kepala Dinas Perdagangan |
| | | Prosentase Peningkatan Usaha Yang Dibina Dalam Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Jumlah Kelompok Pedagang Usaha Informal yang dibina ---------- x 100% Jumlah Kelompok Pedagang Usaha Informal | Bidang Pengembangan Perdagangan | Kepala Dinas Perdagangan |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Peningkatan Perlindungan Konsumen | Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang | Jumlah Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang<br>---------- x 100%<br>Jumlah Alat UTTP yang Tera Ulang | Bidang Kemetrologian | Kepala Dinas Perdagangan |
| | | Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Jumlah Laporan Konsumen yang ditindaklanjuti<br>----------<br>Jumlah Laporan Konsumen | Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting | Kepala Dinas Perdagangan |
| Dinas Perindustrian | | | | | |
| 1. | Terwujudnya Penguatan Akuntabilitasi Kinerja Urusan Industri dan ESDM | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Predikat Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri, Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri, dan Bidang Sarana dan Prasarana Industri | Kepala Dinas Perindustrian |
| 2. | Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian | Nilai Produksi Industri Kecil Menengah | Jumlah Nilai Produksi Industri Kecil Menengah (IKM) | | |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Capaian Nilai Perencanaan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten | Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan<br>---------- x 100%<br>Total Bobot SAKIP Komponen Perencanaan | Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten oleh Menpan RB | Kepala Bappeda |
| | | Persentase IKU Kabupaten dengan Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%) | Jumlah IKU Kabupaten dengan Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)<br>---------- x 100%<br>Jumlah Total IKU Kabupaten | Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Kepala Bappeda |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP | Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP | Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Kabupaten (Inspektorat Daerah Kab. Bone) | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Opini BPK-RI berdasarkan hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Opini BPK-RI sesuai dengan hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Tingkat Kesesuaian Dokumen Penganggaran Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Program beserta Pagu dalam APBD yang sama dengan RKPD<br>----------<br>Keseluruhan Jumlah Program dalam RKPD | Kesesuaian Nomenklatur Program dan Pagu dalam APBD Terhadap RKPD setiap Tahun Anggaran | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Ketepatan Waktu Penetapatan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan | Penyusunan dan Penetapan APBD<br>---------- x 100<br>Perubahan APBD Tepat Waktu<br><br>Penjelasan :<br>a. Penyusunan dan Penetapan APBD paling Lambat 30 September tahun berkenaan<br>b. Perubahan APBD paling Lambat 30 November tahun berkenaan | Laporan Hasil Penyusunan dan Penetapatan/ Perubahan APBD oleh Bidang Perencanaan Anggaran Daerah | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Asset Manajemen | a. Apakah ada daftar aset tetap (ya/tidak).<br>b. Apakah ada manual untuk menyusun daftar Aset tetap ( Ya/tidak).<br>c. Apakah ada proses Inventarisasi asset tahunan (ya/ tidak).<br>d. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (Ya/ tidak). | Laporan Hasil Evaluasi atas Indentifikasi dan Nilai dan Potensi asset daerah oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Badan Pendapatan Daerah | | | | | |
| 1. | *Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah* | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah | Laporan Target dan Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah | Kepala Bapenda |
| 2. | Meningktanya Realisasi Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Pertumbuhan PAD | Realisasi PAD N - Realisasi PAD (-N)<br>---------- x 100<br>Realisasi PAD (-N)<br><br>Ket : (N) Tahun ini<br>(-N) Tahun Lalu<br>Sumber Data : Realisasi Pendapatan | Laporan Target dan Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah | Kepala Bapenda |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang Dipublikasikan Oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah | Kepala Bapenda |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | |
| 1. | Meningkatkan Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN | Indeks Sistem Merit | Hasil Penilaian Indeks Sistem Merit Oleh KASN RI Berdasarkan Permenpan RB No. 4 Tahun 2018 dan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019) | Hasil Rekapitulasi Penilaian Mandiri Indeks Sistem Merit, yang mencakup 8 area meliputi:<br>1) Perencanaan Kebutuhan;<br>2) Pengadaan;<br>3) Pengembangan Karier;<br>4) Promosi dan Mutasi;<br>5) Manajemen Kerja;<br>6) Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin;<br>7) Perlindungan dan Pelayanan; dan<br>8) Sistem Informasi | Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP | Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Oleh APIP | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Daerah yang diserta Peningkatan Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan Dalam Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah | $\frac{\text{Jumlah Kelitbangan yang Ditindak Lanjuti}}{\text{Jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah}} \times 100\%$ | Laporan triwulan dan Tahunan pada Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Bidang Inovasi dan Teknologi | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase Peningkatan Inovasi Daerah | n - (n - 1)<br>---------- x 100%<br>(n - 1)<br><br>Ket:<br>n : Jumlah Inovasi Tahin ini<br>n - 1 : Jumlah Inovasi Tahun lalu | Laporan triwulan dan Tahunan pada Bidang Inovasi dan Teknologi | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2. | Meningkatnya Daya Saing Daerah dengan Pemanfaatan dan Penerapan Inovasi Daerah | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP (Predikat) | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana<br>---------- x 100%<br>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Sesuai Target yang Ditetapkan | Data Pemantauan Daerah Rawan Bencana | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Presentase Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana<br>---------- x 100%<br>Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana | Data Pemantauan Daerah Rawan Bencana | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana<br>----------x 100%<br>Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana | Rekap Data Kejadian Bencana dan Rekap Data BPBD | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Persentase Wilayah Pasca Bencana yang telah Direhabilitasi dan Direkonstruksi | Jumlah Bencana yang Dilakukan Rehabilitasi dan rekonstruksi dalam Masa Pasca Bencana<br>---------- x 100%<br>Jumlah Bencana yang Harus Dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Rekap Data Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan Akibat Bencana | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Mewujudkan Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesatuan Bangsa | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesatuan Bangsa | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari survey kepada ormas, orpol, tokoh agama, tokoh pemuda dan kelompok forum sebagai perwakilan masyarakat terhadap kondisi stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten Bone setiap tahunnya | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP | Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Dengan Standar Layanan Nasional | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP (Predikat) | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Oleh Inspektorat Daerah | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Rumah Sakit yang Professional dan Berintegritas | Pencapaian Standar Akreditasi Rumah Sakit | Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi SNARS merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit versi SNARS. Dikatakan memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi SNARS apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80% dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan Kesehatan di rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan kesehatan rumah sakit tingat nasional.<br><br>**Hasil Penilaian Akreditasi Rumah Sakit** | Hasil Survei TIM Survei Akreditasi Rumah Sakit | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana | | | | | |
| 1. | Peningkatan Kualitas Pelayanan RS sesuai Standar Nasional | BOR (*Bed Occupancy Rate*) 60-85% | Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur di Rumah Sakit:<br>∑ Hari Perawatan<br>x<br>∑ Hari dalam Satu Periode<br>---------- x 100%<br>∑ Tempat Tidur | Rekapan Data Layanan Rumah Sakit | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
| | | LOS (*Length of Stay*) 6-9 Hari | Tingkat Lamanya Perawatan Pasien:<br>∑ Lama Dirawat<br>----------<br>∑ Pasien Keluar (Hidup + Mati) | Rekapan Data Layanan Rumah Sakit | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
| | | BTO (*Bed Turn Over*) 40-50 Kali | Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur:<br>∑ Pasien Keluar (Hidup + Mati)<br>----------<br>∑ Tempat Tidur | Rekapan Data Layanan Rumah Sakit | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
| | | TOI (*Turn of Interval*) 1-3 Hari | Tingkat Hari Dimana Tempat Tidur Tidak Ditempati dari saat ke saat sampai Terisi Berikutnya:<br>((∑ jumlah Tempat Tidur x Periode)<br>–<br>Hari Perawatan)<br>---------- x 100%<br>∑ Pasien Keluar (Hidup + Mati) | Rekapan Data Layanan Rumah Sakit | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
| | | Net Death Rate (NDR) Standar Nasional < 23 ‰ | Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar:<br>∑ Jumlah Pasien mati ≥ 48 jam<br>---------- x 100 Permil<br>∑ Pasien Keluar | Rekapan Data Layanan Rumah Sakit | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
| | | - Gross Death Rate (GDR) Standar Nasional < Standar Nasional GDR adalah < 45 ‰ | Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011)<br>∑ Jumlah Pasien mati seluruhnya<br>---------- x 1000 Permil<br>∑ Pasien Keluar (Hidup + Mati) | Rekapan Data Layanan Rumah Sakit | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | % Pemenuhan Standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan | Persentase tingkat kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit. Tingkat kelengkapan data sarana, prasarana dan alat kesehatan diambil dari nilai kumulasi kelengkapan yang terdapat pada aplikasi ASPAK dari Kementerian Kesehatan | Data ASPAK | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
| | | % Pemenuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar | Persentase ketersediaan SDM berdasarkan standar kebutuhan rumah sakit yang diitung dengan rumus sebagai berikut:<br><br>∑ Jumlah Ketersediaan SDM<br>---------- x 100%<br>∑ Kebutuhan Rumah Sakit | Laporan Renbut | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat yang diukur berdasarkan survei kepuasan masyarakat dengan pengkategorian sebagai berikut:<br>A (Sangat Baik) = 88,31 - 100,00;<br>B (Baik) = 76,61 - 88.30;<br>C (Kurang Baik) = 65.00 - 76,60;<br>D (Tidak Baik) = 25.00 - 65.99. | Hasil Survey IKM | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
| 2. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang profesional, cepat, akurat dan paripurna bagi seluruh lapisan masyarakat pengguna rumah sakit | Pencapaian Standar Akreditasi RS | Tercapaianya status akreditasi rumah sakit menjadi utama dengan pengkategorian sebagai berikut:<br>Akreditasi Dasar = 25%;<br>Akreditasi madya = 50%;<br>Akreditasi Utama = 75%;<br>Paripurna = 100%. | Hasil survei Komisi Akreditasi Rumah Sakit | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
| | | Peningkatan Status RS PPK-BLUD | Meningkatnya status rumah sakit menjadi PPK-BLUD | Hasil penilaian dari Tim PPK-BLUD | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
| | | % Pencapaian Indikator SPM | SPM adalah mutu pelayanan dasar yang diperoleh oleh pasien di rumah sakit. Cara perhitungan persentase capaian indikator SPM adalah sebagai berikut:<br><br>∑ Indikator SPM yang mencapai target<br>---------- x 100%<br>∑ Indikator SPM | Laporan Pencapaian SPM | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | % Pencapaian Indikator Mutu Layanan RS | Tercapainya Indikator nasioanl Mutu layanan RS yang sesuai standar<br><br>∑ Indikator mutu nasional yang mencapai standar<br>---------- x 100%<br>∑ Indikator nasional mutu | Laporan Komite Mutu | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
| | | Penyediaan Sistem Informasi Manajemen RS | Berfungsinya sistem informasi manajemen rumah sakit | Hasil Pemantauan | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
| Kecamatan | | | | | |
| 1. | *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan* | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | Nilai Predikat SAKIP berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah selaku APIP | Inspektorat Kabupaten Bone | Camat |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani/Ditindaklanjuti sesuai Standar<br>---------- x 100%<br>Jumlah Pelayanan Publik yang Masuk | Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Pelayanan Umum | Camat |

Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN